

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLADANGAN DAN PERKEBUNAN LIAR
DI TAMAN NASIONAL KELIMUTU**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama: Hukum Pidana Ekonomi



OLEH:

**FRANSISKUS XAVERIUS NGILO RODJA
NIM: S330811004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013**

commit to user

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLADANGAN DAN PERKEBUNAN LIAR
DI TAMAN NASIONAL KELIMUTU**

Disusun oleh :

Fransiskus Xaverius Ngilo Roodja
NIM. S330811004

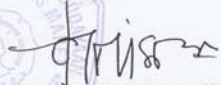
Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing	<u>Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH, MM.</u> NIP. 197210082005012001		25/7/2013
2. Co. Pembimbing	<u>Rofikah, SH, MH.</u> NIP. 195512121983032001		24/7/2013

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

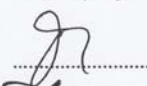
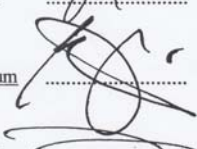

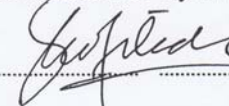

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH
NIP. 196302091988031003

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLADANGAN DAN PERKEBUNAN LIAR
DI TAMAN NASIONAL KELIMUTU**

Disusun oleh :


Fransiskus Xaverius Ngilo Roodja
NIM. S330811004

Telah disetujui oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua/ Penguji	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH</u> NIP.196302091988031003		25/7-2013
2. Sekretaris/ Penguji	<u>Dr. Al. Sentot Sudarwanto, SH., M.Hum</u> NIP.195911271986011004		24/7-2013
3. Anggota	<u>Dr. I. Gusti Ayu Ketut RH., SH., M.Hum</u> NIP. 197210082005012001		25/7/2013
4.	<u>Rofikah, SH., MH</u> NIP. 195512121983032001		25/7-2013

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S
NIP.196107171986011001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH
NIP.196302091988031003

PERNYATAAN

N a m a : Fransiskus Xaverius Ngilo Rodja

N I M : S.330811004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERLADANGAN DAN PERKEBUNAN LIAR DI TAMAN NASIONAL KELIMUTU”** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keasliannya, saya memperbolehkan tesis ini di-*upload* dalam website Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Juli 2013

Yang membuat pernyataan,

Fransiskus Xaverius Ngilo Rodja

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perladangan dan Perkebunan Liar di Taman Nasional Kelimutu”** ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat magister program studi ilmu hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Terima kasih dan penghargaan penulis haturkan kepada yang sangat saya hormati, Ibu Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH, MM., dan Ibu Rofikah, SH., MH., atas bimbingannya selama proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis mendapatkan perluasan wawasan, kedalaman ilmu, ketelitian, penajaman analisis dan peningkatan daya kritis sejak penyusunan proposal, seminar rencana penelitian sampai penulisan akhir tesis ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Dr. M. Hudi Asrori S, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak/Ibu dosen pengampu pada pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kerangka berpikir teoritis sekaligus membekali penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Segenap staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh perkuliahan pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
9. Ir. Sri Mulyani, M.Si, selaku Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu yang telah mendukung dan memberi masukan-masukan yang cukup berarti dalam penulisan tesis ini beserta seluruh rekan-rekan kerja Balai Taman Nasional Kelimutu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, Cletus Rodja (almarhum) dan Maria Dopo yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik dan memberikan doa yang tiada henti kepada penulis, Bapak Mertua Abdul Akil dan Ibu Mertua Sri Mulyani dan semua saudaraku yang telah banyak membantu, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi imbalan amal kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.
11. Kepada istri tercinta Ninis Yulianingsih, anaku Bima Edward Ibrahim Rodja dan Glenn Richardo Rodja, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi angkatan 2011, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasi yang luar biasa selama menimba ilmu di Surakarta. Secara khusus untuk rekan-rekan rimbawan karyasiswa Kementerian Kehutanan angkatan tahun 2011 di Universitas Sebelas Maret Surakarta: Mas Andik Sumarsono, Mas Lukman Hidayat, Mas Herdianto, Mas Didik Sudjianto dan Mbak Yuli. Terimakasih atas persaudaraan, bantuan dan diskusi yang selalu hangat selama menimba ilmu di Surakarta.

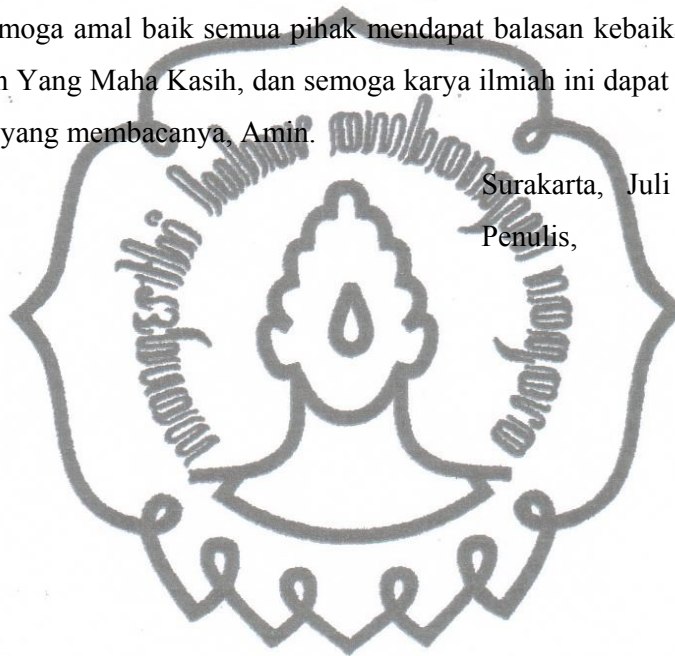
13. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menyusun tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dapat menjadikan tesis ini menjadi semakin sempurna.

Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kasih, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Surakarta, Juli 2013

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR BAGAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Kerangka Teori.....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2. Teori Bekerjanya Hukum.....	28
3. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	31
4. Pengertian Perladangan dan Perkebunan Liar.....	36
5. Pengertian Taman Nasional.....	43
6. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	48
B. Penelitian yang Relevan.....	52
C. Kerangka Berpikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Sifat Penelitian.....	57

commit to user

C.	Pendekatan Penelitian.....	58
D.	Lokasi Penelitian.....	59
E.	Sumber Data Penelitian.....	59
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	61
G.	Teknis Analisis Data.....	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A.	Hasil Penelitian.....	64
1.	Gambaran Umum Taman Nasional Kelimutu.....	64
a.	Sejarah Kawasan.....	64
b.	Letak, Luas dan Zonasi Kawasan.....	66
c.	Kondisi Geologis.....	71
d.	Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar Taman Nasional Kelimutu.....	72
e.	Kondisi Biofisik.....	74
f.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan.....	79
g.	Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat di Sekitar Kawasan.....	84
h.	Organisasi dan Tata Kerja.....	85
i.	Intensitas Tindak Pidana yang Terjadi di TN. Kelimutu.....	90
2.	Faktor Faktor Penyebab Terhambatnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perladangan dan Perkebunan Liar di Taman Nasional Kelimutu.....	95
a.	Komponen Subtansi Hukum.....	95
b.	Komponen Struktur Hukum.....	100
c.	Komponen Budaya Hukum.....	112
B.	Pembahasan.....	119
1.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perladangan dan Perkebunan Liar.....	119
a.	Komponen Subtansi Hukum.....	119

commit to user

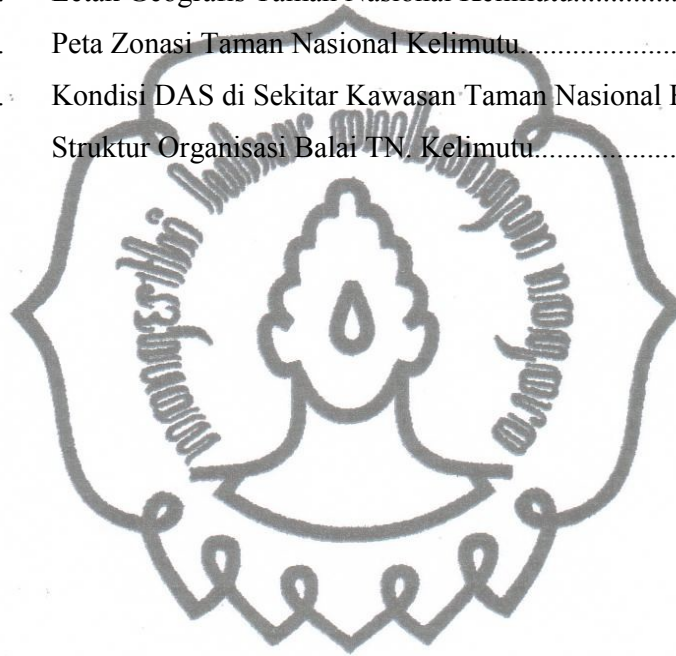
	b.	Komponen Struktur Hukum.....	138
	c.	Komponen Budaya Hukum.....	149
	2.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perladangan Dan Perkebunan Liar Di Wilayah Balai Taman Nasional Kelimutu.....	156
	a.	Upaya Penanggulangan Perladangan dan Perkebunan Liar di Taman Nasional Kelimutu Dengan Sarana Pidana (<i>Penal Policy</i>).....	157
	b.	Upaya Penanggulangan Perladangan dan Perkebunan Liar di Taman Nasional Kelimutu Dengan Sarana Tanpa Pidana (<i>Non Penal Policy</i>)..	162
BAB V		PENUTUP.....	172
	A.	Simpulan.....	172
	B.	Implikasi.....	178
	C.	Saran.....	178

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran desa yang berbatasan dengan TN. Kelimutu.....	68
Tabel 2.	Zonasi Taman Nasional Kelimutu.....	70
Tabel 3.	Jenis-jenis Vegetasi Langka di TN Kelimutu.....	76
Tabel 4.	Jenis-jenis Fauna Langka di TN Kelimutu.....	78
Tabel 5.	Jenis Tanaman di Setiap Penggunaan Lahan.....	80
Tabel 6.	Luas Wilayah dan Kependudukan Desa Desa Sekitar Taman Nasional Kelimutu 5 (lima) Tahun Terakhir.....	82
Tabel 7.	Keadaan Pegawai Balai Taman Nasional Kelimutu Menurut Tingkat Pendidikan.....	89
Tabel 8.	Keadaan pegawai Taman Nasional Kelimutu menurut jabatan selama 5 (lima) tahun terakhir.....	90
Tabel 9.	Data Tindak Pidana yang Terjadi di TN Kelimutu Periode 2004 Sampai Dengan 2012.....	90
Tabel 10.	Data Luasan Areal Perladangan dan Perkebunan Liar di TN. Kelimutu.....	92
Tabel 11.	Sarana Pengamanan dan Perlindungan Hutan Lingkup Balai Taman Kelimutu.....	94
Tabel 12.	Data Persebaran Polhut Lingkup Balai Taman Nasional Kelimutu.....	95
Tabel 13.	Prosentase Alokasi Anggaran Kegiatan Pemberdayaan di TN. Kelimutu.....	147
Tabel 14.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Niowula.....	154
Tabel 15.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Saga.....	154

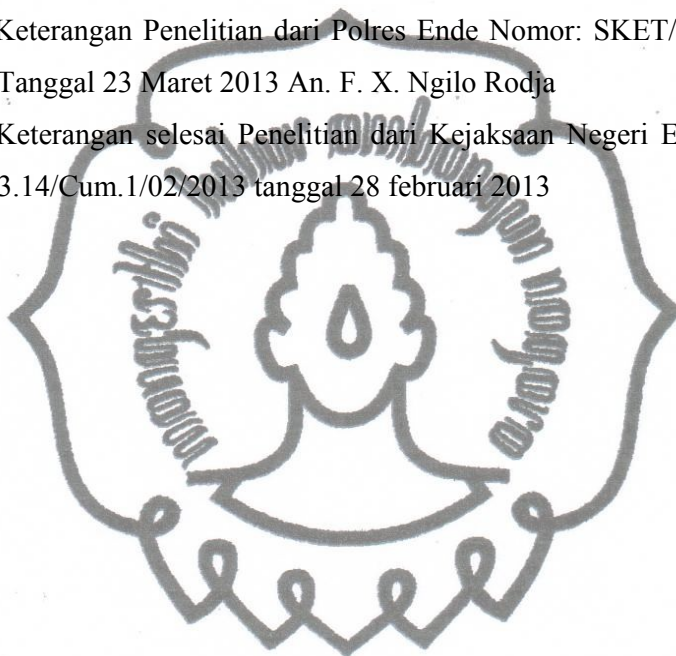
DAFTAR BAGAN/ GAMBAR

Bagan 1.	Skema Kebijakan Kriminal.....	50
Bagan 2.	Kerangka Berpikir.....	55
Bagan 3.	Skema Analisis data Interaktif.....	63
Gambar 4.	Letak Geografis Taman Nasional Kelimutu.....	67
Gambar 5.	Peta Zonasi Taman Nasional Kelimutu.....	69
Gambar 6.	Kondisi DAS di Sekitar Kawasan Taman Nasional Kelimutu...	73
Bagan 7.	Struktur Organisasi Balai TN, Kelimutu.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi No.SI.1562/BTNK1 -1/2012 tanggal 18 Desember 2012 An. Fransiskus Xaverius Ngilo Rodja.
2. Surat Keterangan/ Rekomendasi Untuk Mengadakan Penelitian Nomor BKPPM.26/IV/02/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 An. F. X. Ngilo Rodja
3. Surat Keterangan Penelitian dari Polres Ende Nomor: SKET/3/III/2013/ Res. Ende, Tanggal 23 Maret 2013 An. F. X. Ngilo Rodja
4. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Kejaksaan Negeri Ende Nomor: B-288/P.3.14/Cum.1/02/2013 tanggal 28 februari 2013



DAFTAR SINGKATAN

CR	= Critically Endangered
DAS	= Daerah Aliran Sungai
DEPHUT	= Departemen Kehutanan
EN	= Endangered
FAO	= Food And Agriculture Organization
GBHN	= Garis Garis Besar Haluan Negara
GPS	= Global Position System
Ha	= Hektar
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
PBB	= Perserikatan Bangsa Bangsa
UNCED	= United Nations Conference on Environment and Development
RPJN	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
KPA	= Kelompok Pencinta Alam
KSDA	= Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAH & E	= Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LC	= Least Concern
LIPI	= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MDK	= Model Desa Konservasi
mdpl	= Meter Diatas Permukaan Laut
MMP	= Masyarakat Mitra Polhut
NT	= Near Threatened
PEH	= Pengendali Ekosistem Hutan
PHKA	= Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Polhut	= Polisi Kehutanan
POLRI	= Polisi Republik Indonesia
PP	= Peraturan Pemerintah
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
TKP	= Tempat Kejadian Perkara
TN	= Taman Nasional
RBM	= Resort Based Management
RTK	= Register Tanah Kehutanan
SDM	= Sumber Daya Manusia
SPKP	= Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan
SPORC	= Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat
SPTN	= Seksi Pengelolaan Taman Nasional
UPT	= Unit Pelaksana Teknis
UU	= Undang Undang
UUD	= Undang Undang Dasar
VU	= Vulnerable

ABSTRAK

Fransiskus Xaverius Ngilo Rodja, S.330811004 **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perladangan dan Perkebunan Liar di Taman Nasional Kelimutu.”**

Tesis: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perladangan dan perkebunan liar di Taman Nasional Kelimutu, serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian diagnostik yang mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5 yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan guna memperoleh data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perladangan dan perkebunan liar di Taman Nasional Kelimutu masih mengalami hambatan dipengaruhi oleh: (1) Berdasarkan kajian substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan untuk mengatur tindak pidana perladangan dan perkebunan liar masih banyak mengandung kelemahan (2) Berdasarkan kajian struktur hukum yaitu jumlah dan kualitas aparat penegak hukum di bidang kehutanan masih terbatas, belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki, Inkonsistensi kebijakan penanganan terhadap tindak pidana, koordinasi lintas sektoral antara sesama penegak hukum belum berjalan efektif, (3) Berdasarkan kajian budaya hukum yaitu budaya internal yang dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan hukum petugas masih rendah dan budaya hukum eksternal masyarakat sekitar kawasan hutan yang paternalistik, kemiskinan dan tidak berfungsinya hukum adat.

Upaya yang disarankan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perladangan dan perkebunan liar di TN. Kelimutu adalah melalui upaya *penal* dan upaya *non penal* yang integratif. Adapun upaya dimaksud adalah: Merevisi peraturan perundang undangan serta kebijakan *non penal* melalui Peniadaan faktor kondusif terjadinya perladangan dan perkebunan liar dengan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan

Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, perladangan dan perkebunan liar, Taman Nasional.

ABSTRACT

Fransiskus Xaverius Ngilo Rodja. S330811004. **“The Law Enforcement on Criminal Offense of Illegal Farming and Plantation at National Park”**. Thesis: The Graduate Program in Law Science, Sebelas Maret University, Surakarta.

The objective of this research is to investigate why the law enforcement on the criminal offense of illegal farming and plantation at Kelimutu National Park is hampered, and what solution shall be taken in an attempt to prevent it through the criminal policy by using a means of a penal law and a non-penal law.

This research used the non-doctrinal descriptive diagnostic research method with the approach based on the fifth legal concept, in which the law is defined as manifestation of symbolic meanings of social behaviors as indicated by the interaction among them. The data of the research were gathered through field study and library research so as to obtain primary and secondary data. They were then analyzed by using the qualitative interactive model of analysis.

The result of the analysis shows that the law enforcement on the criminal offense of illegal farming and plantation at Kelimutu National Park is hampered by the following: (1) based on the study of legal substance, that is, the laws which are the references for regulating the criminal offense of illegal farming and plantation still contain many weaknesses; (2) based on the study of legal structure, the number and quality of law enforcements are still limited, the facility and infrastructure owned have not been used optimally, there are inconsistencies in the policy of handling the forestry offenses, and the inter-sector coordination among the law enforcement apparatuses has not run effectively; and (3) based on the legal culture, the internal culture influenced by the legal awareness and knowledge of the apparatuses is still low, in term of external legal culture the society residing around the forest area is paternalistic and poor, and the customary law does not function as expected.

The efforts proposed to deal with the criminal offense of illegal farming and plantation at Kelimutu National Park are the integrated penal and non-penal ones such as revising the prevailing laws and regulations and non-penal policies through the abolishment of conducive factors for illegal farming and plantation by improving certain social conditions, but at the same time indirectly having preventive effects on such offenses.

Keywords: Law enforcement, offense, illegal farming and plantation, and National Park